

ENTERPRENEUR GOVERNMENT DI DESA MANYAMPA KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA

Asri Tandi^{1*}, Fatmawati², Sitti Rahmawati³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to how capable village government its integrity as a pioneer in the implementation of government that think creatively, innovatively and professionally in order to realize a good village government independently. This study used a qualitative descriptive method. Data collection techniques were observation and documentation for describing and analyzing village government as entrepreneurs. The results of this study showed that the entrepreneur government in Manyampa village was seen from the aspects (1) A market-oriented government was initialized but in its implementation not maximized, in developing village entrepreneur government. Village government was not analyzed and observed the conditions on the market at implementation of entrepreneur that he pioneered. (2) Competitive government already run well but needed to increase cooperation from various parties in use support the current entrepreneurship. (3) Results-oriented government, it was still necessary to improve the professional attitude of work in developing entrepreneurship and needed to be aware of all element of village government in the improvement original village income.

Keywords: *entrepreneurial government, village*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan pemerintah desa mampu mengembangkan Integritasnya sebagai pelopor pada pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pola pikir yang kreatif, inovatif dan profesional agar terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi untuk menjabarkan serta menganalisa pemerintahan desa yang *Entrepreneur*. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa *Entrepreneur Government* di desa Manyampa dilihat dari aspek (1) pemerintahan yang berorientasi pasar sudah terealisasi akan tetapi pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini, terlihat dari pemerintah desa belum cermat dalam menganalisa dan mengamati keadaan/kondisi pada perkembangan pasar dari pelaksanaan *entrepreneur* tersebut. (2) Pemerintahan yang kompetitif/persaingan sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu peningkatan kerja sama dari berbagai pihak guna mendukung wirausaha yang dijalankan saat ini. (3) Pemerintahan yang berorientasi pada hasil hal ini masih perlu untuk meningkatkan sikap profesional bekerja dalam mengembangkan wirausaha serta perlu kesadaran diri dari seluruh elemen pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan asli desa.

Kata Kunci: *entrepreneur government, desa*

* asritandi@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah desa dalam merespon dinamika yang ada dalam berbagai tuntutan globalisasi maka hadirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkungan setempat pada suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat membuka pola pikir pemerintah dalam menghadapi dan menjawab tantangan dari perubahan zaman yang begitu cepat.

Sebagaimana yang di maksud dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 Kepala desa memiliki wewenang membina serta meningkatkan suatu perekonomian suatu desa dan terintegrasi agar suatu tujuan ekonomi mempunyai skala yang produktif agar terciptanya masyarakat desa yang makmur dan sejahterah. Dan tercantum juga dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dikenal dengan konsep pembangunan Desa seperti ini membawa konsekuensi prakarsa pemerintahan, karena seluruh mekanisme perencanaan diserahkan kepada hasil akhir dari Musrenbang daerah sehingga peran desa

terpinggirkan dalam memperkarsai dan menggerakkan roda pembangunan di desa.

Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa harus memulai pengelolaan aset untuk melalui cara berwirausaha. Seluruh aparat pemerintah sejak dini menanamkan jiwa dan perilaku berwirausaha, dengan melihat keadaan perekonomian, keuntungan/kerugian pada pelaksanaan dari keadaan bangsa/Negara sebagai bentuk sikap menyadari diri sebagai langkah awal dalam berwirausaha.

Mewirausahakan pemerintah desa adalah salah satu cara pembaharuan sistem pemerintahan yang telah mentransformasikan sistem bisnis di perusahaan swasta ke dalam sistem pemerintahan daerah atau desa. peran pemerintahan harus berdampak pada terjadinya peningkatan keberdayaan masyarakat terutama yang berada di kalangan bawah.

Akibatnya pemerintahan *entrepreneur* beralih pada sistem yang memisahkan antara kebijakan yang mengarahkan dengan kebijakan yang memberikan pelayanan (mengayuh) penerapan *Reiventing Government* adalah jalan menuju perubahan dari aturan yang mengikat dalam

menyensong aparaturn pemerintah dalam berwirausaha dalam lembaga-lembaga organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Penerapan prinsip ini diharapkan pemerintah mampu mengembangkan integritas pegawai negeri, yang mempunyai pola pikir yang kreatif, inovatif, dan profesional, dalam berwirausaha.

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba adalah satu dari sekian banyak desa yang berada di kabupaten Bulukumba yang mempunyai wirausaha desa. Pemerintah desa Manyampa mempunyai tiga bentuk wirausaha yang dijalankan saat ini yaitu: (1) bergerak dibidang pengembangan peternakan sapi (berternak sapi) dirintis dari tahun 2017, (2) bergerak dibidang pariwisata (pengembangan tempat Pariwisata Hutan Mangrove) dimulai tahun 2019, (3) Pemerintah desa menyewakan *sound sistem* tahun (alat karaoke) pada masyarakat yang mengadakan suatu acara dirintis dari tahun 2018.

Desa Manyampa mengambil atau menjalankan wirausaha sebagai bentuk inovasi *entrepreneur government* yang berjalan saat ini dengan tujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan makmur. Wirausaha tersebut dapat memberi masukan yang maksimal tanpa tergantung lagi dari

dana desa tersebut, hal ini sudah berjalan dari penerapan prinsip yang berwirausaha akan tetapi ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dari pemerintah desa yang masih menuai banyak kendala.

Oleh karena itu, kesangupan, kesiapan, dan kesigapan di Desa Manyampa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada maka, diharapkan Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat menjadi suatu desa yang tingkat kemandiriannya yang makmur dan sejahterah tanpa bergantung sepenuhnya dari alokasi anggaran dari dana desa serta mempunyai jiwa semangat berwirausaha pada sektor publik yang berbasis dengan kearifan lokal dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai berwirausaha dalam pemerintahan desa tersebut.

Entrepreneur Government yaitu pemerintah yang bisa menciptakan kebijakan berlandaskan warga negara. Kebijakan yang dibuat mempunyai nilai strategis yang dapat menghasilkan dukungan warga negara dalam melakukan perbesaran dukungan dari warga negara adalah suatu tantangan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga bisa memfokuskan pada tiga tugas penting

yaitu: merespon dengan cepat keluhan dari warga negara, melakukan pengawasan rutin, dan menghukum bagi pelanggar aturan. (Mohammad:2014).

Entrepreneur Government merupakan suatu cara untuk berpikir strategis, yang dapat memperluas pandangan dan memanfaatkan kreativitas yang dimiliki. Wirausaha berhubungan dengan pemerintah yang bukan sekedar menghasilkan krearivitas ide-ide akan tetapi diimbangi juga dengan keterampilan dalam mewujudkan ide-ide tersebut. Pemerintah yang dapat dan bisa mengambil resiko serta dapat menjelaskan langkah yang akan dicapai dalam mewujudkan ide –ide tersebut yang dimilikinya. (Sumarhadi:2012).

Dalam konteks bisnis pendapat Swasono (Anggiani 2018). Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha.

Ada 6 karakteristik *entrepreneur government* menurut pendapat Thompson (Muslimin 2010). yaitu sebagai berikut: 1) Berorientasi pada hasil, 2) fleksibel, 3) bertanggung jawab pada visi/misi, 4) kreatif dan inovatif, 5) memanfaatkan peluang, 6) bekerja keras.

Menurut *David Osborn dan Ted Gaebler* (2014) tentang *Entrepreneur Government* mempunyai 10 prinsip yaitu: (a). Pemerintahan Katalis: merupakan pemerintahan yang membedakan tugas atau wewenang pemerintah dengan mengerakkan (merumuskan dan menetapkan regulasi). Sebagai fungsi Legislasi, dengan fungsi implementor. Fungsi menyalurkan dan melaksanakan regulasi. Dengan demikian pemerintah memanfaatkan berbagai cara seperti (kontrak, voucher, hadiah, dan insentif pajak). (b). Pemerintahan Milik Masyarakat: adalah pemerintah yang mendesentralisasikan tugas dan wewenang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat meninjau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau birokrat. Dengan demikian hak progresif masyarakat dapat ditinjau dalam hal mengalihkan wewenang. Adanya pengawasan ini juga yang dilakukan oleh masyarakat, dan pemerintah yang terpilih dalam hal ini politisi, mampu membuat suatu kesanggupan. Sehingga pemerintah dapat berinovasi serta kreatif lagi dalam pemecahan masalah yang ada di kalangan pemeritah dan masyarakat. (c). Pemerintahan Kompetitif.

Pemerintah yang menciptakan suatu persaingan antara pemerintah dengan Swasta, dengan demikian pemerintah dapat mengukur dan menganalisa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hal pelayanan dan sebagainya. Dan akan banyak belajar dari pengalaman sebelumnya dan akan memperbaiki dan merubah dimasa yang akan datang. (d). Pemerintah yang berorientasi pada Hasil: adalah pemerintah yang dapat mengubah suatu potensi yang ada, dengan berpenghasilan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, pemerintah disini dituntut mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai guna dalam menjalankan suatu pemerintahan. Serta mengembangkan apa yang menjadi nilai tambah untuk memaksimalkan dalam menciptakan pemerintahan yang sejahtera. (e). Pemerintahan Berorientasi Misi: pemerintah yang melakukan deregulasi internal, merubah dan menyesuaikan regulasi secara internal. seperti: penggunaan anggaran, sistem kepegawaian, dan pengadaan. Mereka mensyaratkan setiap bulan aparat pemerintah menemukan kejelasan dari misi yang dijalankan dan memberi kebebasan pada Manager menentukan cara terbaik dalam mewujudkan misi tersebut dalam batas-batas legal. (f). Pemerintah yang

berorientasi pada pelanggan: adalah Pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakatnya, bukan Birokrasi karna salah satu pemerintahan yang baik adalah mengutamakan masyarakat bukan demi kepentingan pribadi saja. Memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat adalah hak progresif untuk masyarakat. (h). Pemerintahan yang berorientasi pada wirausaha: adalah pemerintah adalah pemerintah yang dapat berpenghasilan sendiri dengan cara berwirausaha bekerja sama dengan bada-badan publik, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya serta sumber daya manusia agar berpenghasilan. Pemerintah yang dimaksud disini mempunyai ide kreatif, inovatif dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Desa sendiri, mempunyai sumber daya yang berpotensi menghasilkan nilai tambah untuk pemerintah itu sendiri. (i). Pemerintahan Antisipatif: pemerintahan antisipatif yaitu dimana pemerintah yang melihat pada masa depan. Mereka meminimalisir suatu masalah dalam pemberian layanan guna melenyapkan masalah. Dalam hal ini menggunakan perencanaan strategi, dan tujuan kedepannya dan sebagai cara untuk memandang ke depan agar pemerintahan dapat berjalan dengan

maksimal. (j). Pemerintahan Desentralisasi: adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. Pemerintah berusaha mendorong serta mencegah munculnya suatu fenomena atau masalah, ketimbang melakukan pelayanan agar dapat menghilangkan suatu masalah yang akan terjadi. (k). Pemerintahan Berorientasi Pasar: pemerintah dalam hal ini menggunakan orientasi pasar swasta dalam menyelesaikan masalah ketimbang memanfaatkan cara administratif, misalnya menyalurkan pelayanan, tugas, dan kontrol pengawasan berlandaskan regulasi.

Berdasarkan pendapat *Davis Osborne dan Ted Gaebler* 2017 tujuan *Entrepreneur Government* yaitu: a. Merubah laba menjadi pemanfaatan publik, yang dimaksud yaitu menciptakan perusahaan swasta dengan cara menjual pelayanan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. b. Menghasilkan uang dengan melakukan pembebanan biaya agar mendapatkan pendapatan selain dari pajak ialah dengan membebani biaya kepada mereka yang memakai pelayanan pemerintah. c. Investasi untuk mendatangkan hasil, investasi bukan suatu cara yang dapat mendatangkan uang, melainkan suatu cara untuk

menyimpang uang. d. Merubah pimpinan menjadi wirausaha, ketika pimpinan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali bukan berarti mereka tidak menajarnya. Jika menginginkan seorang pemimpin agar berpikir wirausaha setidaknya memberikan mereka dorongan yaitu dengan andil tabungan serta mendapatkan, berinovasi, menyediakan dana usaha, memfokuskan pusat laba, dan mempersiapkan biaya pelayanan. e. Merubah fungsi pemerintahan sebagai alat penghasil uang daripada menghabiskan anggaran.

Pandangan Osborne dan Plastrik (2018) mengatakan bahwa ada lima strategi yang ditempuh untuk menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha. Lima strategi tersebut antara lain: i. Strategi Inti: memperjelas tujuan organisasi, memisahkan fungsi pengarahan dari fungsi pelaksanaan. Memfokuskan bagaimana cara untuk memisahkan pekerjaan yang sifatnya stratejik dari pekerjaan yang sifatnya operasional. ii. Strategi Konsekuensi: melakukan sistem insentif yang dilakukan seseorang atau organisasi. cara yang ditempuh adalah melakukan persaingan yang terarah dengan menggunakan strategi pasar untuk mendorong agar berjalannya kompetisi, melakukan pendekatan manajemen

perusahaan, melakukan pendekatan manajemen kinerja, alat yang digunakan dengan cara memberikan bonus, bagi hasil, pembayaran kerja, dan kesepakatan kerja. iii. Strategi Pelanggan: memfokuskan pada akuntabilitas Strategi pelanggan mendeskripsikan apa yang seharusnya dipertanggung jawabkan serta tetap menjaga suatu instansi bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Cara yang digunakan adalah memberikan pilihan kepada pelanggan untuk memilih sistem publik atau sistem informasi, memadukan strategi pelanggan dengan strategi konsekuensi, serta memastikan kualitas pelanggan yang dilakukan. iv. Strategi Pengendalian: cara yang dilakukan adalah menghapuskan peraturan dan pengawasan yang tidak penting. Melakukan pemberdayaan pegawai, penghapusan pengawasan manajemen yang hirarki dalam suatu instansi atau organisasi. v. Strategi Budaya: cara yang dilakukan adalah membuat budaya baru serta membentuk kebiasaan organisasi yang baru, untuk menyikapi perubahan yang baru seharusnya pegawai tidak dikontrol akan tetapi dilibatkan, menciptakan perilaku yang diharapkan, membuat diri agar fleksibel, membuat batasan antara budaya yang baru dan budaya yang lama,

memberikan kebebasan, melakukan komunikasi yang baik, dan berkomitmen pada tujuan jangka panjang.

Pemerintah desa yang *entrepreneur* berdasarkan pernyataan Ahmad (2003) adalah pemerintah desa yang dapat mengembangkan serta mengelola aset dan memanfaatkan potensi/SDA yang ada pada desa agar dapat meningkatkan perkembangan ekonomi keuangan pada desa tersebut.

Pemerintah desa yang *Entrepreneur* yaitu pemerintah desa yang melakukan pembaharuan sistem pemerintahan yang kemudian mentransformasikan sistem bisnis di perusahaan swasta ke dalam sistem pemerintahan daerah atau desa. (Moeljarto Tjokrowinoto, dkk : 2011).

Menurut Soemantri (Bambang Trisantono : 2011) ada 6 ciri pemerintahan yang *entrepreneur* yaitu:

- a. tanggap melihat keinginan/atau kebutuhan masyarakatnya agar terciptanya pola hubungan yang baik pemerintah dan masyarakat.
- b. membina masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pembangunan.
- c. mempunyai jiwa yang inovatif dan kreatif agar dapat meningkatnya partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan pemerintahan.
- d. selalu memikirkan perubahan menuju pemerintahan yang

baik agar berguna untuk pemerintahan itu sendiri. e. punya Sikap tangguh serta berkeinginan besar kearah dalm peningkatan aparatur pemerintah desa. f. berlandaskan visi dan misi agar terciptanya pemerintahan desa yang mengarah pada tujuan dan tanggung jawab dalam aparatur pemerintah desa.

Peran bumdes dalam mewirauasakan pemerintah desa Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDES pasal 12 ayat (2) tentang Jenis Usaha yang terdiri dari Jasa, Penyaluran bahan pokok, perdangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga. Berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha yang dibentuk dengan tujuan adalah memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan tersebut, ada 6 contoh pengembangan BUMDES yaitu: Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pemanfaatan air bersih serta irigasi, Pasar Desa, Perdangan hasil Pertanian, Peternakan, perikanan, jasa Transportasi dan IT, serta Industri Kelompok rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan

penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel koran dan lain-lain.

Desain dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, artinya peneliti lebih memfokuskan kearah kejadian yang dipilihnya serta memahami secara mendalam dengan menggunakan metode yang intensif, mendalam dan terperinci dari suatu organisasi atau fenomena tertentu. Berdasarkan kajian peneliti bahwa *Entrepreneur Government* memerlukan pemahaman terhadap sejauh mana aparat desa memahami wirausaha dengan penerapan *Enterpreneur Government* di Desa Manyampa Kabupaten Bulukumba.

Penelitian menggunakan teknik *Purposive* sampling dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dan pertimbangan peneliti serta selalu menghubungkannya antara satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan *Entrepreneur Government* di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada 3 Teknik analisa data, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian yaitu *reduksi* data penyajian data dan *Verifikasi* data. Pada teknik pengabsahan data penelitian kali ini, peneliti menggunakan takhnik keabsahan data cara uji kreadibilitas melalui proses Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Manyampa telah mengimplementasikan UU RI No. 6 Tahun 2014 yang dimana pemerintah Desa dengan cara berwirausaha. Mewirausahakan pemerintah desa adalah salah satu cara pembaharuan sistem pemerintahan yang telah mentranformasikan sistem bisnis di perusahaan swasta ke dalam sistem pemerintahan daerah atau desa. Lewat undang-undang tersebut adalah cara dalam merubah paradigma pemerintah desa yang bersifat mengikat akan peraturan yang terdapat dalam birokrasi pemerintah desa Manyampa Kabupaten Bulukumba.

Sebagaimana yang di maksud dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 kepala desa memiliki wewenang membina serta meningkatkan suatu perekonomian suatu desa dan terintegrasi agar suatu tujuan perekonomian mempunyai skala

yang produktif agar terciptanya desa dan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pemerintah Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba telah mengimplementasikan peranannya sebagai pelopor dalam membangun desa yang dimana pemerintah desa telah berwirausaha atau menerapkan prinsip *entrepreneur government* pada desa.

Pada pelaksanaan pemerintah yang *berentrepreneur* Desa Manyampa mempunyai wirausaha yang terdiri dari: wirausaha peternakan sapi dirintis pada tahun 2017, wirausaha Pariwisata hutan Mangrove dirintis pada tahun 2019 dan wirausaha penyewaan *sound sistem* pada masyarakat pada acara pesta dan lain-lain dirintis tahun 2018. Pemerintah Desa Manyampa mengambil atau menjalankan wirausaha sebagai bentuk inovasi *entrepreneur government* yang berjalan saat ini dengan tujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan makmur. Wirausaha tersebut dapat memberi pemasukan yang maksimal tanpa tergantung lagi dari dana desa tersebut, hal ini sudah berjalan dari penerapan prinsip yang berwirausaha di Desa Manyampa.

Pada penelitian ini peneliti menjadikan prinsip *entrepreneur government* yang dipelopori oleh *David Osborn dan Ted Gaebler* (2014) sebagai

indikator dalam mengungkapkan dan membahas berbagai permasalahan pada pelaksanaan *entrepreneur government* di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Adapun aspek-aspek yang dimaksud yaitu: a. Pemerintahan yang berorientasi pada pasar : yaitu pemerintah dapat menyesuaikan keadaan pasar dengan melihat lingkungan sekitar, melihat bagaimana perkembangan pasar apa yang cocok dikelola pada suatu desa/daerah dan tidak mengandung unsur kesamaan berupa ide, produk, strategi dan lain-lain.

Dari hasil wawancara dengan bapak A. Syahril selaku pengelola bumdes mengatakan bahwa Pemerintah Desa Manyampa dalam hal keadaan pasar dimana pemerintah terus-menerus melakukan pengembangan ternak sapi. Pengembangan ternak sapi pemerintah desa memiliki 7 ekor sapi terdiri dari 6 ekor betina 1 ekor jantan pemerintah desa dalam hal ini bumdes terus meninjau perkembangan ternak tersebut dan rencana kami di desa Manyampa akan menjadikan desa kami sebagai lumbung sapi Bali. Kemudian pengembangan hutan Mangrove kami selaku pemerintah desa terus-menerus melakukan pengembangan bulan lalu kami baru saja membeli perahu 2 buah yang bisa dipergunakan untuk

berkeliling disekitar hutan Mangrove. hal ini kami lakukan guna menarik simpatik wisatawan untuk berkunjung ke hutan Mangrove. Hasil yang kami peroleh dari pariwisata hutan Mangrove ± 30 selama dirintis tahun 2019. Selanjutnya penyewaan sound sistem dimana penyewaan tersebut banyak yang menyanyingi kami. Tentunya kami dalam hal ini pemerintah desa Manyampa perlu melakukan inovasi agar penyewaan sound sistem desa terus eksis di lingkungan desa kami. Hasil dari penyewaan alat koroke semenjak kami rintis kurang lebih 2 tahun penghasilannya itu ± 2 Juta.

Selanjutnya pernyataan dari Basran selaku Sekretaris desa keadaan pasar memang hal yang sangat fundamental dalam melakukan pengelolaan, pengembangan wirausaha tentunya kami selaku pemerintah desa Manyampa terus berinovasi dalam mempertahankan beradaan wirausaha kami. Agar nantinya terus eksis di lingkungan desa kami. Meskipun hasil yang kami peroleh belum maksimal”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam menghadapi pasar dimana pemerintah Desa Manyampa terus melakukan pengembangan wirausahanya agar kedepannya memperoleh hasil yang maksimal dan terus berinovasi dalam

menghadapi persaingan pasar guna wirausaha yang dijalankan tumbuh dan berkembang pesat dan semakin maju lagi kedepannya. Pemerintahan yang berorientasi pada pasar pemerintah desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba masih belum maksimal juga dan masih kurang kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Dalam hal ini, pemerintah desa belum cermat menganalisa dan mengaamati keadaan/kondisi pasar pada pelaksanaan *Entrepreneur* yang dirintisnya. b. Pemerintahan yang kompetitif/persaingan.

Pemerintah desa harus mampu mendorong, merangsang dan menciptakan sistem yang berkompetisi pada penyelenggaraan pembangunan desa dengan melibatkan persaingan pemerintah dengan sektor swasta dan pemerintah dengan pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengukur dan menganalisa kelemahan-kelemahan dan akan belajar dari pengalaman sebelumnya dan akan memperbaiki dimasa yang akan datang.

Dari hasil wawancara dengan basran selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa masalah persaingan dirana tingkat desa tentu kami selaku pemerintah desa dalam melaksanakan

wirausaha saat ini selalu ingin memberikan inovasi baru atau wirausaha yang tidak sama dengan wirausaha desa lain. Dalam menghadapi persaingan misalnya wirausaha pada sektor wirausaha di desa Tammato sektor pariwisata disana itu tarif masuk ketempat sport disana tarifnya 10 ribu per orang diluar untuk fasilitas sportnya untuk mengambil foto/gambar contohnya sport sepeda gantung yang tarifnya itu 20 ribu satu kali naik. Ini tentunya kami selaku pemerintah desa yang merintis wirausaha meskipun disektor pariwisata kami (hutan Mangrove) tarifnya hanya 10 ribu perorang dan parkir 5 ribu tetapi minat masyarakat itu banyak dan kami tidak menyewakan sport foto untuk di bayar pokoknya kalau masuk bebas mengambil gambar. Ini tentunya membuat pengunjung senang karna tidak dibebankan biaya tambahan lagi (sport foto). Dibandingkan dengan desa Tammato yang membebankan biaya kepada penjunjung yang menggunakan fasilitas untuk sport foto.

Selanjutnya pernyataan yang serupa dari bapak A. Syahril selaku pengelola bumdes menyatakan bahwa dalam menghadapi persaingan kami selaku pengelola wirausaha kami terus memberikan inovasi-inovasi pada wirausaha kami saat ini. Contohnya pada sektor pariwisata untuk menambah

minat pengunjung kami baru saja membeli perahu 2 buah bulan lalu, yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk sport foto. Ini adalah strategi kami selaku pengelola agar wirausaha *kami* terus berkembang dalam menghadapi persaingan dengan desa yang lain.

Dari pernyataan tersebut dalam disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Manyampa dalam hal menghadapi persaingan pada sektor pariwisata, pemerintah desa berinovasi dengan meningkatkan minat pengunjung dengan cara melakukan pembenahan pada hutan Mangrove dengan membeli perahu yang bisa digunakan oleh pengunjung. Ini tentunya menambah minat pengunjung untuk mengunjungi tempat pariwisata hutan Mangrove tersebut. Bukan hanya itu, dalam hal pengembangan ternak sapi pemerintah desa akan menjadikan desa Manyampa sebagai Lumbung sapi bali (peternakan sapi dengan kualitas terbaik) ini tentunya, meningkatkan persaingan dalam berwirausaha. pemerintahan yang kompetitif/persaingan sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu meningkatkan kerja sama dari berbagai pihak guna mendukung wirausaha yang dijalankan saat ini. Kerja sama dengan sektor swasta bertujuan sebagai penyuplai atau pemberi modal kepada desa untuk mengembangkan wirausaha

Peternakan sapi, Pariwisata hutan Mangrove dan Penyewaan sound sistem di desa Manyampa Kabupaten Bulukumba. c. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: yang dimaksud disini ialah pemerintah yang mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas (output atau hasil), mengedepankan hasil ketimbang memanfaatkan anggaran dana desa (ADD). Sehingga pemerintah desa mempunyai masukan dan tidak bergantung pada anggaran dari pusat dengan demikian, pemerintah desa bisa mandiri, kreatif, dan inovatif dalam proses pembangunan desa.

Dari hasil wawancara dengan Abbas Madda selaku kepala Desa Manyampa yang mengatakan bahwa penghasilan dari wirausaha peternakan sapi yang kami rintis penghasilannya itu lamban karna sapi betina biasanya selama mengandung itu sampai proses beranak kisarannya itu 8-9 bulan. Ini tentunya lamban dari penghasilan ternak sapi. Penghasilan dari pengembangan hutan Mangrove kurang \pm 30 juta selama wirausaha ini dioperasikan. Kemudian penyewaan sound sistem penghasilannya itu tidak terlalu menjamin masuk di PAD. karna apabila jika yang menyewa itu aparat desa kami tidak membebankan biaya kepada mereka karna mereka sebagai pengurus. Selama berjalan pendapatan

dari sound sistem selama dirintis kurang lebih 2 juta rupiah.

Selanjutnya pernyataan dari A. Syahril selaku pengelola bundes yang sedana dengan pernyataan diatas “penghasilan yang masuk ke PAD masih belum maksimal karna masih kurangnya kesadaran aparat desa dalam mengembangkan wirausaha dan masih mengedepankan hubungan kekeluargaan contohnya pada penyewaan sound sistem aparat desa yang menggunakan alat karaoke tersebut mereka tidak menyewanya. Ini hal yang menghambat atau merusak birokrasi kita sekarang dan kurang baik dilakukan.

Dari pernyataan tersebut dalam disimpulkan bahwa wirausaha yang dijalankan saat ini hasil yang dipelolah belum maksimal pada pada pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari kurang profesionalnya aparat desa dalam mengembangkan wirausaha serta perlu adanya kesadaran diri dari seluruh elemen pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. serta menumbuhkan sifat wirausaha bagi semua aparat desa.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka akan dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai *Entrepreneur*

Government di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Pada aspek pemerintahan pada pasar Pemerintah desa belum mampu membaca kondisi dan situasi dalam menghadapi perkembangan pasar. Jika pemerintah berpikir kreatif maka pemerintah mampu mengelola dan melaksanakan tugasnya dengan baik misalnya pada wirausaha peternakan sapi seharusnya pemerintah lebih berpikir cepat bagaimana peternakan sapi tersebut mempunyai hal yang baik agar nantinya sapi yang ditenak dapat dijual pada pasar sehingga pemerintah desa memperoleh hasil yang diinginkan Pemerintah lebih memfokuskan pada pengembangan saja.

Kemudian wirausaha Pariwisata hutan Mangrove pemerintah desa mempunyai banyak kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah enggan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam menyuplai modal baik itu dari pemerintah kabupaten maupun dari pihak swasta.

Wirausaha akan lebih maju lagi kedepannya jika pemerintah mengeksplor pemikirannya dalam hal kerja sama dari berbagai pihak. Contohnya dalam mendukung obse

wisata hutan Mangrove pemerintah bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata. Dalam hal ini pemerintah desa lamban merespon perubahan dimasa yang akan datang pemerintah dalam berwirausaha masih menganut sistem egoisme dalam berpikir.

Pada wirausaha penyewaan sound sistem (alat Karaoke) berdasarkan pada orientasi pasar diketahui bahwa wirausaha ini tidak begitu menjamin pendapatan desa karna sifat penggunaannya yang jarang difungsikan atau dipergunakan oleh masyarakat desa karna wirausaha ini mempunyai banyak pesaingan. Kebanyakan masyarakat desa memiliki alat tersebut ini tentunya dapat mengurangi pendapatam pada desa. Hal ini perlu adanya suatu inovasi dan kreativitas dari aparat desa guna memaksimalkan wirausaha tersebut.

Entrepreneur peternakan sapi dilihat dari aspek persaingan dimana pemerintah desa dalam hal menghadapi persaingan pemerintah desa terus berupa mengembangkan peternakan sapi dan kedepannya peternakan sapi desa Manyampa ingin menjadikan sebagai desa yang menjadi pusat peternakan sapi dengan kualitas terbaik yang ada di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Seharusnya pemerintah desa mencoba hal yang baru

yaitu dengan melakukan persaingan dengan pihak-pihak yang terkait guna mengukur kelemahan sampai sejauh mana pemerintah bisa mengelola wirausaha tersebut.

Pemerintah desa pada wirausaha pariwisata hutan Mangrove dilihat dari aspek kompetitif/persaingan pemerintah terus melakukan pengembangan hutan mangrove dengan cara merenovasi dan menambah *spot* foto guna memperindah suasana yang ada pada objek pariwisata hutan Mangrove. Diketauidalam menghadapi persaingan dengan desa lain pemerintah Desa Manyampa berinisiatif dengan membeli 2 perahu yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk menikmati suasana hutan Mangrove. Hal ini adalah suatu langkah yang baik guna menambah minat wisatawan untuk berkunjung ke pariwisata hutan Mangrove.

Kemudian penyewaan sound sistem dilihat pada aspek persaingan wirausaha ini mempunyai banyak pesaing dari data dilapangan dapat diketahui bahwa yang memiliki *sound sistem* (alat Karaoke) selain yang disewakan oleh Desa Manyampa masyarakat desa cukup banyak juga memiliki alat tersebut. Ini tentunya dalam hal persaingan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa kurang berjalan dengan baik.

Pemerintah desa dalam menghadapi persaingan perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung agar wirausaha ini, dapat bersaing diruang lingkup desa secara sehat. Serta dibutuhkan suatu inovasi yang dapat menggait hati masyarakat desa yang melakukan suatu acara untuk menyewa alat karaoke yang dimiliki oleh desa.

Entrepreneur Government
peternakan sapi dilihat dari aspek berorientasi hasil pada tahap ini dalam memperoleh hasil dari ternak sapi pemerintah desa terus melakukan pengembangan. Sejak dirintis tahun 2017 pemerintah sampai sekarang terus berupa pada proses pengembangan saja karna mengingat pertumbuhan sapi yang sangat lamban. Kedepannya pemerintah desa akan menjadikan desa Manyampa sebagaipusat pengembangan sapi dengan kualitas terbaik.

Kemudian pariwisata hutan Mangrove dilihat dari aspek berorientasi hasil data dilapangan bahwa hasil yang diperoleh dari wirausaha tersebut sejak dirintis dari tahun 2019 menunjukkan pendapatan ± 30 Juta selama beroperasi ini menunjukkan bahwa minat pengunjung terkait pariwisata hutan Mangrove sangat tinggi.

Wirausaha penyewaan sound sistem (alat Karaoke) dilihat pada aspek orientasi hasil diketahui bahwa wirausaha ini semenjak dirintis tahun 2018, selama \pm dua tahun berjalan jauh dari kata maksimal terkait pendapatan asli desa. Hal ini terlihat dari banyaknya aparat desa yang memiliki sikap kurang profesional dalam menjalankan amanat dalam bekerja. Dari hasil analisa terkait wirausaha tersebut dapat diketahui bahwa apabila yang menyewa oleh keluarga aparat desa mereka tidak membebaskan biaya penyewaan alat karaoke tersebut.

Ini tentunya dapat merugikan desa serta mencederai wirausaha tersebut. Setelah dua tahun dirintis pendapatan dari hasil wirausaha penyewaan sound sistem (alat Karaoke) yang masuk pada pendapatan asli desa ± 2 Juta rupiah. Melihat dari angka pendapatan asli desa tersebut wirausaha penyewaan alat karaoke pada masyarakatselama terlaksana dalam kurung waktu dua tahun pendapatan desa dari wirausaha tersebut kurang maksimal dalam hal pendapatan. Yang disebabkan oleh banyaknya aparat desa yang masih menjunjung sikap kurang profesional dalam menjalankan amanat dalam bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan tentang *Entrepreneur Government* maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 1. Pemerintahan berorientasi pada pasar Pemerintah desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan *Entrepreneur Government* sudah terelialisasi akan tetapi pada pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik dalam mengembangkan *Entrepreneur*. Pemerintah desa dalam hal ini, belum cermat menganalisa dan mengaamati keadaan/kondisi pada pasar pada pelaksanaan *Entrepreneur* yang dirintisnya. Lemahnya SDM dan pemahaman tentang *Entrepreneur Government* pada aparat Desa Manyampa menjadi salah satu faktor kendala yang harus dibenahi dalam pengembangan wirausaha tersebut agar kedepannya mempunyai hasil yang lebih baik. 2. Pemerintahan yang kompetitif/persaingan Pada pelaksanaan pemerintahan yang kompetitif/persaingan pemerintah desa dalam menghadapi persaingan pada pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pemerintah desa belum melakukan kolaborasi/kerja sama dari pihak-pihak yang mendukung

agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari wirausaha yang dikembangkan saat ini, sehingga dapat terwujud dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Pemerintah desa juga kurang memperhatikan SDA yang bisa dikelola dan memanfaatkan agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). 3. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada pelaksanaan pemerintahan berorientasi hasil pemerintah Desa Manyampa belum memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan perlu meningkatkan dan menjunjung tinggi sikap profesional dan kualitas dalam bekerja bagi seluruh elemen pemerintahan desa dan diperlukan kesadaran diri untuk mengembangkan wirausaha desa agar terwujudnya pemerintah desa yang mandiri serta kreatif dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2018. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Anggiyani, Sarfilianty. 2018. *Kewirausahaan: Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan*. Jakarta: PrenadamediaGroup.
- Asriadi AR. 2014. *Strategi Entrepreneurial Government di Kota Sinjai*. Dokumen desa RPJM desa 2019

- Fatikha, Citra Annisa. 2016. *Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah*. Jurnal Administrasi pemerintah Daerah.
- Ferdi S. Gani. 2016. *Implementasi Entrepreneur Government Dalam Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo)*
- Idris Yanto Niode. 2011. *Implementasi Enterpreneurial Government dan Kinerja Pemerintahan Daerah*
- Kara, H. Muslimin., dan Jamaluddin. 2010. *Pengantar Kewirausahaan*. Makassar: Alauddin Press.
- Osborn, David dan Ted Gaebler. 2017. *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Plastrik, Peter dan David Osborne. 2018. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Teruna Grafica.
- Sayyidati, Adiba, HT.Amir. M. 2019. *Mendorong Kinerja Birokrasi Melalui Strategi Entrepreneur di Kabupaten Jawa Timur*. Jurnal Litbang Kebijakan.
- Sinaga, Irwan. 2017. *Penerapan Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarya, Abas PO, dkk. 2011. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- UU RI No. 6 tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 *tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat*.
- Zulkarnaini. 2013. *Reiventing Kelembagaan Pemerintahan Dearah yang Ramping dan Efesiensi*.